

EVALUASI KETAHANAN PANGAN DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

Iswahyudi

Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra, Langsa

Abstrak

Berkurangnya luas sawah karena tingginya laju konversi lahan merupakan faktor utama yang dapat mengurangi produksi padi yang dapat mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Konversi lahan sawah boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan sawah bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat didalamnya. Sehubungan dengan isu tersebut, direkomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian konversi lahan sawah untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui kebijakan penetapan lahan sawah abadi, peningkatan produktivitas padi dan pemberian intensif kepada petani padi

Kata Kunci : ketahanan pangan, konversi lahan, lahan sawah abadi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thomas Malthus memberi peringatan pada tahun 1798 bahwa jumlah manusia akan meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha penambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika, sehingga akan terjadi sebuah kondisi dimana dunia akan mengalami kekurangan pangan akibat pertambahan ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Pemikiran Malthus telah mempengaruhi kebijakan pangan internasional, antara lain melalui Revolusi Hijau yang sempat dianggap berhasil meningkatkan laju produksi pangan dunia sehingga melebihi laju pertambahan penduduk. Pada saat itu, variabel yang dianggap sebagai kunci sukses penyelamat ketersediaan pangan adalah teknologi (Nasoetion, 2008).

Hingga awal tahun 2000-an, sebelum pemanasan global menjadi suatu

AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol. 3 No. 1 Jan – Juni 2016

isu penting, dunia selalu optimis mengenai ketersediaan pangan. Bahkan waktu itu, FAO memprediksi bahwa untuk 30 tahun ke depan, peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan produksi pangan yang tinggi itu akan terjadi di negara-negara maju. Selain kecukupan pangan, kualitas makanan juga akan membaik. Prediksi ini didasarkan pada data historis selama dekade 80-an hingga 90-an yang menunjukkan peningkatan produksi pangan di dunia rata-rata per tahun mencapai 2,1%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dunia hanya 1,6% per tahun. Memang, untuk periode 2000-2015 laju peningkatan produksi pangan diperkirakan akan menurun menjadi rata-rata 1,6% per tahun, namun ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dunia yang diprediksi 1,2% per tahun. Untuk periode 2015-2030 laju pertumbuhan produksi pangan diprediksikan akan lebih rendah

lagi yakni 1,3% per tahun tetapi juga masih lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk dunia sebesar 0,8% per tahun. Juga FAO memprediksi waktu itu bahwa produksi biji-bijian dunia akan meningkat sebesar 1 miliar ton selama 30 tahun ke depan, dari 1,84 miliar ton di tahun 2000 menjadi 2,84 miliar ton di tahun 2030 (Husodo, 2002).

Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting, dan banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara di sisi lain lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya semakin kecil, atau bahkan secara absolut cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia akan dilanda kelaparan karena defisit produksi/stok.

World Food Program (WFP) menyatakan bahwa akibat melejitnya harga pangan dunia, sekitar 100 juta orang di tiap benua terancam kelaparan. Badan PBB ini menyebut krisis pangan tersebut sebagai *the silent tsunami*, petaka yang melanda diam-diam. Sementara itu, Oxfam, sebuah LSM dari Inggris, memperkirakan setidaknya 290 juta orang terancam kelaparan akibat krisis pangan kali ini (Hadar, 2008). Orang yang terancam kelaparan dalam jumlah yang besar tersebut mengindikasikan bahwa memang, seperti yang dinyatakan di *Sunday Herald* bahwa krisis pangan kali ini adalah yang terbesar sejak awal abad ke-21. Sayogya dalam Triyanto 2006, menggunakan equivalen konsumsi beras per kapita sebagai ukuran kemiskinan di Indonesia. Di sebagian negara-negara Asia, beras memiliki nilai politik strategis yang mempunyai implikasi pemerintahan akan labil jika harga berasnya tidak stabil dan sulit diperoleh. Di Indonesia kondisi ini

masih diperburuk dengan adanya kendala di sisi produksi.

Salah satu faktor penyebab defisit ketersediaan beras nasional adalah laju konversi lahan sawah yang tidak terkendali, khususnya di Pulau Jawa. Konversi lahan sawah pada periode tahun 1997-2003 mencapai 47.000 ha/tahun, 91% diantaranya terjadi di Pulau Jawa (Irawan, 2005). Konversi lahan sawah tersebut diperkirakan akan meningkat dalam 5 tahun mendatang sebagai akibat pembangunan infrastruktur jalan tol sepanjang 1.500 km di Pulau Jawa dan Bali. Dampak negatif konversi lahan sawah tersebut terhadap penurunan produksi beras secara nasional sulit untuk diimbangi oleh upaya peningkatan perluasan areal sawah di luar Pulau Jawa. Hal tersebut karena pencetakan sawah baru memerlukan investasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp. 25.000.000/ha (Sumaryanto dalam Irawan, 2005). Sementara itu masih ada dua faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan beras, yakni laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi dan tingkat konsumsi beras per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari aspek konsumsi, perwujudan ketahanan pangan juga mengalami hambatan karena sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber karbohidrat berupa beras. Dengan tingkat konsumsi beras sebesar 130 kg/kap/th membuat Indonesia sebagai konsumen beras tertinggi di dunia, jauh melebihi Jepang (45 kg), Malaysia (80 kg), dan Thailand (90 kg). Penduduk Indonesia yang berjumlah 212 juta membutuhkan beras untuk keperluan industri dan rumah tangga lebih dari 30 juta ton per tahun. Kebutuhan beras tersebut akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika rata-rata pertumbuhan penduduk 1,8% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan 238,4 juta dan tahun

2015 menjadi 253,6 juta. Dengan melihat kondisi potensi produksi padi nasional, diperkirakan tahun 2015 persediaan beras akan mengalami defisit sebesar 5,64 juta ton (Siswono *et al.*, 2002 dalam Briawan, 2004). Pada akhir bulan Agustus tahun 2013, Indonesia sudah mengimpor beras hingga 35.818 ton dengan nilai US\$ 19,132 juta. Jika diakumulasikan dari bulan Januari hingga Agustus 2013, banyaknya beras yang masuk ke Indonesia dari 5 negara (Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan Myanmar) tercatat sedikitnya 302.707 ton beras dengan nilai US\$ 156,332 juta (BPS RI, 2013).

Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Aceh mempunyai tingkat produksi padi yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Produksi pada dasarnya merupakan hasil kali luas panen dengan produktivitas per hektare lahan, sehingga seberapa besar produksi suatu wilayah sangat tergantung berapa luas panen pada tahun yang bersangkutan atau berapa tingkat produktivitasnya. Luas lahan yang tersedia bersifat tetap, bahkan cenderung berkurang karena beralih fungsi ke non pertanian. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian menyebabkan berkurangnya lahan sawah yang pada akhirnya akan menurunkan produksi padi di Kabupaten Aceh Utara. Peningkatan kebutuhan terhadap lahan perumahan dan infrastruktur, dan perubahan fungsi lahan pertanian untuk pengembangan industri dan lain-lain akibat pertumbuhan penduduk merupakan penyebab konversi lahan yang menyebabkan penurunan kemampuan produksi padi di Kabupaten Aceh Utara.

1.2. Tujuan

Mengevaluasi ketahanan pangan sampai tahun 2040 di Kabupaten Aceh Utara dan menetapkan solusi dalam

AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol. 3 No. 1 Jan – Juni 2016

mengatasi krisis pangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara.

II. KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

2.1. Permasalahan Ketahanan Pangan

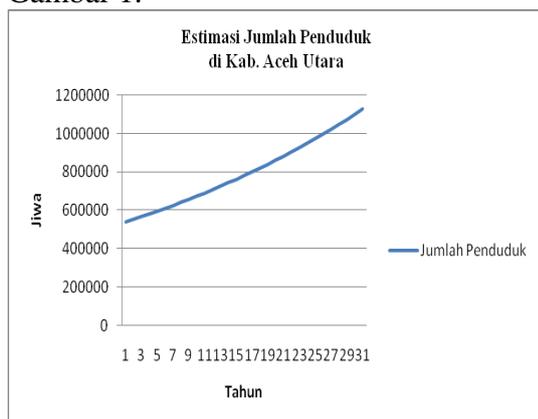
Permasalahan ketahanan pangan telah melanda Indonesia, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Aceh Utara yang diharapkan dapat mengimbangi peningkatan jumlah dan konsumsi penduduk sudah dapat dicapai, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi padi di Kabupaten Aceh Utara malah cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang melanda pertanian Kabupaten Aceh Utara, seperti semakin berkurangnya areal garapan petani, keterbatasan pasokan air irigasi, dan mahalnya harga input serta relatif rendahnya harga produk pertanian. Perilaku konsumsi beras penduduk Kabupaten Aceh Utara juga menjadi perhatian, anggapan bahwa seseorang belum bisa dikatakan makan jika belum makan nasi masih menjadi pemahaman yang kental di masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Data tentang jumlah penduduk dan kondisi umum lahan sawah di Kabupaten Aceh Utara tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk dan kondisi umum lahan sawah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011.

No.	Parameter	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah penduduk	555.317	jiwa
2.	Total luas panen padi	72.702	ha
3.	Pertumbuhan penduduk/tahun	2,48	%
4.	Produktivitas lahan	5,6	ton/ha
5.	Rata-rata konversi lahan sawah/tahun	3	%

Sumber: BPS Kab. Aceh Utara, 2012.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2011 adalah 555.317 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 2,48%/tahun. Total luas panen padi di Kabupaten Aceh Utara 72.702 ha/tahun, dengan produktivitas lahan sawah 5,6 ton/tahun, sedangkan rata-rata konversi lahan sawah ke non sawah sebesar 3%/tahun. Estimasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 1.



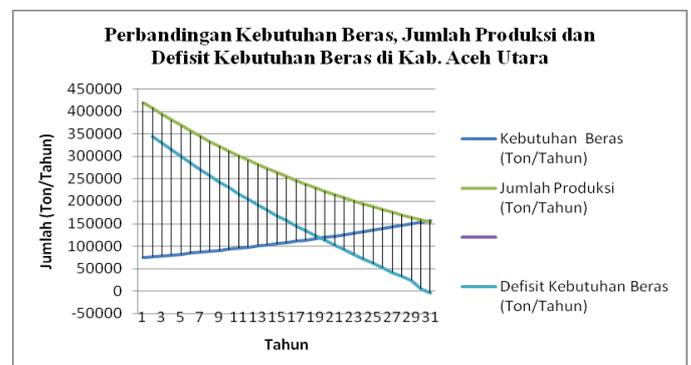
Gambar 1. Grafik jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,48%/tahun, maka diperkirakan pada tahun 2040 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.129.991 jiwa.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka menyebabkan kebutuhan akan konsumsi beras juga meningkat. Berdasarkan survei BPS tahun 2013, indeks konsumsi beras penduduk Indonesia adalah 139 kg/kapita/tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2011 yang semula sebesar 555.317 jiwa, meningkat menjadi 1.129.991 jiwa pada tahun 2040, sejalan dengan itu maka kebutuhan beras untuk konsumsi yang semula 75.321 ton/tahun akan meningkat menjadi 157.069 ton/tahun. Apabila laju konversi lahan sawah tidak dapat dihentikan, maka diperkirakan pada tahun 2040 total luas panen padi di Kabupaten Aceh Utara hanya tersisa 27.474 ha/tahun. Dengan berkurangnya total luas panen padi,

berpengaruh terhadap produksi beras. Diperkirakan pada tahun 2040, produksi beras di Kabupaten Aceh Utara hanya sebesar 153.852 ton/tahun sedangkan jumlah beras yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk adalah 157.069 ton/tahun. Perbandingan kebutuhan beras, jumlah produksi dan defisit kebutuhan beras di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 2.

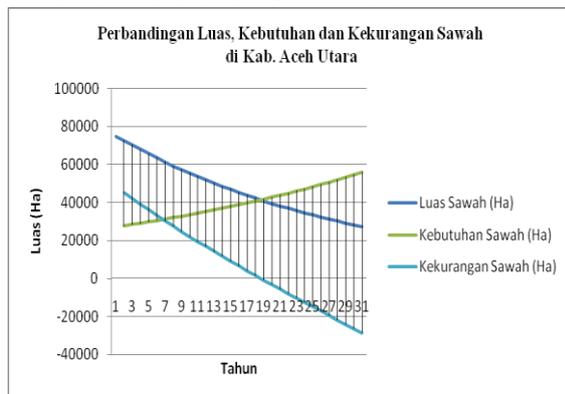
Laju konversi lahan sawah sebesar 3%/tahun akan menyebabkan berkurangnya luasan lahan sawah. Luas lahan sawah yang pada tahun 2011 seluas 72.702 ha, berkurang menjadi 27.474 ha pada tahun 2040. Sedangkan seiring pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan akan kebutuhan beras, diprediksikan pada tahun 2040 Kabupaten Aceh Utara membutuhkan tambahan luas lahan sawah sebesar 56.096 ha. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus mencari lahan sawah baru untuk memenuhi kekurangan lahan sawah tersebut. Perbandingan luas, kebutuhan dan kekurangan sawah di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Grafik perbandingan kebutuhan beras, jumlah produksi dan defisit kebutuhan beras Kabupaten Aceh Utara.

Dengan berkurangnya total luas panen padi, berpengaruh terhadap produksi beras. Diperkirakan pada tahun 2040, produksi beras di Kabupaten Aceh Utara hanya sebesar 153.852 ton/tahun sedangkan jumlah beras yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk

adalah 157.069 ton/tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada tahun 2040 Kabupaten Aceh Utara akan mengalami defisit beras sebesar 3.217 ton/tahun.



Gambar 3. Grafik perbandingan luas, kebutuhan dan kekurangan sawah Kabupaten Aceh Utara.

Apabila terjadi defisit antara kebutuhan dan produksi, maka yang terjadi adalah kenaikan harga yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Badan Urusan Logistik (BULOG) Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab terhadap penyediaan beras dalam mengantisipasi naik turunnya harga beras di pasaran dengan menyediakan tingkat persediaan yang aman dalam mengantisipasi keadaan bencana alam (kemarau, banjir) dan peningkatan kebutuhan beras pada bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

2.2. Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan

Suatu hal yang sangat realistik apabila upaya pengadaan beras di Kabupaten Aceh Utara bertumpu pada kemampuan produksi sendiri mendapat prioritas dari Pemda dan seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Perlu digarisbawahi bahwa terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan

pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat didalamnya. Sehubungan dengan isu tersebut, direkomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah, yaitu melalui kebijakan penetapan sawah abadi, peningkatan produktivitas padi dan pemberian intensif kepada petani padi.

2.2.1. Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Abadi

Istilah “sawah abadi” mulai dikampanyekan sejak diadakan Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah di Bogor Provinsi Jawa Barat tahun 2001, yang juga dihadiri oleh para aktivis dan pecinta sawah dari negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2009 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini merupakan jawaban terhadap lemahnya payung hukum yang melindungi lahan pertanian pangan yang selama ini sangat tinggi tingkat konversinya menjadi lahan non pertanian. Peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman yang sangat serius dalam menyediakan persediaan pangan, khususnya beras, dan hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dengan adanya sawah-sawah abadi akan mampu menghilangkan adanya kekhawatiran akan punahnya lahan sawah dapat dihindari, sekaligus kelestarian swasembada pangan tetap dapat dipertahankan.

Bupati dan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin terhadap konversi lahan sawah ke non sawah harus memahami terhadap isi Undang-Undang

No. 41 Tahun 2009. Dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 73 berbunyi, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, harus segera menetapkan kawasan lahan persawahan abadi, agar tidak mudah dikonversikan untuk kepentingan lain. Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan berupa beras. Ketersediaan lahan abadi sudah menyangkut kepentingan nasional, di tengah-tengah isu impor beras yang jumlahnya cenderung meningkat tiap tahun di Indonesia.

2.2.2. Peningkatan Produktivitas Padi

Peningkatan produktivitas padi melalui introduksi varietas padi baru sangat memungkinkan di lakukan di Kabupaten Aceh Utara. Selama ini, sudah banyak peneliti yang telah menemukan varietas padi unggul di Indonesia. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sangat intensif melakukan penelitian untuk menemukan varietas padi unggul. BATAN telah menemukan padi varietas Inpari Sidenok, berasal dari singkatan Inbrida Padi Irigasi Dedikasi Nuklir adalah benih padi yang saat ini menjadi pilihan petani. Petani lebih suka menyebutnya dengan Sidenok. Varietas itu dirilis Mei 2011 lalu berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2257/Kpts/SR.120/2011.

Benih ini sempat menyita perhatian para pengunjung Pameran Pembangunan Pertanian Nasional 2011 dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan

(Penas KTNA) XIII yang berlangsung di Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dikarenakan memiliki umur tanam yang cukup pendek yaitu 103 hari dan memiliki potensi hasil 9,1 ton gabah kering giling perhektarnya. Inpari Sidenok adalah hasil dari iradiasi sinar Gamma 0,20 kGy pada benih Diah Suci yang merupakan hasil persilangan Cilosari dengan IR-74 yang kemudian dimutasikan dengan cara iradiasi. Memiliki cita rasa pulen, berumur genjah dan juga tahan akan serangan hama wereng coklat strain 1, 2 dan 3, tahan akan serangan penyakit bakteri hawar daun strain 3 dan agak tahan strain 4 (Finance.detik.com 2013).

Berkontribusi untuk ketahanan pangan serta kemajuan agrikultur Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan lima varietas padi unggulan. Kelima varietas unggulan yang diluncurkan tersebut adalah IPB 3S, IPB 4S, IPB Batola 5R, IPB Batola 6R, dan IPB Kapuas 7R. Kelima varietas padi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. IPB 3S, misalnya, cocok bagi sawah tadah hujan dan lahan irigasi. Jenis padi ini memiliki produktivitas 7 ton per hektare (ha) dan berpotensi menghasilkan 11,2 ton per ha. Untuk jenis IPB 4S baik dikembangkan pada media sawah tadah hujan dan lahan irigasi. Padi jenis ini memiliki produktivitas 7 ton dan berpotensi menghasilkan 10,5 ton per ha. Baik IPB 3S dan IPB 4S memiliki ketahanan terhadap tungro, agak tahan terhadap penyakit blast, dan agak tahan terhadap hawar daun bakteri (Dikti, 2012).

Jenis ketiga adalah IPB Batola 5R yang diperuntukan bagi lahan pasang surut dan lebak. Padi jenis ini memiliki produktivitas 4.3 ton per ha dan berpotensi menghasilkan 5,3 ton per ha Gabah Kering Giling (GKG). Kemudian, jenis IPB Batola 6R memiliki produktivitas 4,2 ton per ha dan berpotensi menghasilkan 4.9 ton per ha GKG. Keempat varietas tersebut berhasil mendapatkan SK dari Kementerian Pertanian pada 28 Maret lalu.

Terakhir, jenis IPB Kapuas 7R merupakan varietas unggul padi bagi daerah rawa. Jenis padi ini berhasil mendapatkan SK dari Kementan 7 Juli 2012 dengan produktivitas 4,5 ton per ha dan berpotensi menghasilkan 5,1 ton ha GKG. Varietas ini tahan terhadap penyakit blast, agak peka pada wereng batang coklat, tahan cekaman Al dan Fe, serta tahan cekaman (Dikti, 2012).

2.2.3. Pemberian Insentif Kepada Petani Padi

Kemiskinan yang selama ini menghimpit kehidupan petani di Indonesia bukan karena harga pupuk naik dan kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Mengaitkan kenaikan harga pupuk dan impor beras dengan kemiskinan petani adalah sebuah pernyataan politik. Pernyataan demikian justru akan menyembunyikan permasalahan pokok, yang selama ini telah mengakibatkan petani tetap miskin.

Kemiskinan yang dialami oleh petani padi di Indonesia karena petani kita tidak terorganisasi dengan baik dan sekaligus tidak punya database padi. Dua hal inilah yang dimiliki petani padi India, Thailand, dan Vietnam. Meski harga pupuk naik, mereka tetap bisa mengeksport beras ke Indonesia sebab mereka selalu surplus. Petani Indonesia sangat lemah karena pemerintah tidak pernah mampu melihat permasalahan pokok yang dihadapi para petani padi kita. Hingga solusi yang diberikan pun juga selalu salah. Indonesia memang punya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) serta Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA). HKTI adalah hasil peleburan berbagai ormas tani atas kehendak pemerintah Orde Baru pada tahun 1973. Sementara KTNA merupakan perkembangan dari lembaga serupa yang sudah ada sejak zaman Belanda. HKTI adalah society, sementara KTNA baru kelompok. Sampai saat ini, keduanya

dirasakan tidak mampu untuk memakmurkan kehidupan petani.

Petani kita perlu Kelompok Tani Padi, Koperasi Produksi Padi, dan Asosiasi Petani Padi. Kalau ada pertemuan padi internasional, umumnya yang datang dari negara lain adalah wakil Asosiasi Padi, bukan ketua society seperti wakil dari Indonesia. Kita memang sudah punya koperasi unit desa (KUD). Namun, KUD adalah koperasi serba usaha, yang kerjanya memberikan kredit (seperti koperasi kredit), menjual minyak tanah (seperti halnya koperasi konsumsi), dan membeli gabah petani dengan harga yang selalu jauh di bawah harga pasar. Itulah sebenarnya “penyakit utama” yang diderita petani kita. Yang selalu diklaim sebagai database pertanian oleh aparat Departemen Pertanian sebenarnya hanyalah data statistik, bukan database pertanian.

Pemberian subsidi ke petani sebenarnya sangat tidak sehat. Sebab, petani yang tidak berprestasi pun akan ikut menikmati subsidi. Beda dengan insentif, yang hanya akan diberikan apabila petani mencapai standar tertentu dalam memproduksi komoditas pertanian. Para petani di Jepang menerima insentif ketika bersedia menanam padi. Sebab, minat menanam padi sudah sangat menurun di negeri ini. Kalau panen mereka melampaui target, insentifnya tambah. Kalau para petani padi ini mau menanam lahan pertanian nonpadi, insentifnya akan bertambah besar lagi. Insentif tertinggi diberikan apabila para petani padi tersebut menanam lahan nonpertanian yang masih menganggur.

Salah satu bentuk insentif adalah pemberian kredit dengan bunga murah. Di Taiwan, petani padi yang mau menanam lahan pertanian nonpadi akan memperoleh kredit dengan tingkat suku bunga lebih rendah. Petani yang bersedia menanam padi di lahan nonpertanian akan memperoleh pembebasan pajak bumi. Pemberian insentif melalui bunga murah ini bisa berlangsung dengan tertib karena

adanya asosiasi dan tersedianya database padi. Tanpa itu semua, pemberian kredit murah hanya akan menghasilkan salah urus. Database dan pembentukan koperasi produksi padi serta asosiasi petani padi mutlak diperlukan. Kalau harga pupuk naik dan petani ingin protes, yang protes adalah asosiasi petani padi, bukan LSM atau society yang membela petani, sambil menggondong kepentingan politik mereka. Sebaliknya pemberian disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

1. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara, maka menyebabkan kebutuhan akan konsumsi beras juga meningkat. Apabila laju konversi lahan sawah tidak dapat dihentikan, maka diperkirakan akan terjadi kekurangan pangan di Kabupaten Aceh Utara.
2. Direkomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah, yaitu melalui kebijakan penetapan sawah abadi, peningkatan produktivitas padi dan pemberian intensif kepada petani padi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2012. Data Strategis BPS. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. 2011. Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2010. Lhoksukon.
- Briawan D. 2004. Pengembangan Diversifikasi Pangan Pokok Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Darwanto D H. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152-164*. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dan MMA-Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Finance.detik.com/read/2013/12/04/084417/2431818/911/varietas-unggul-padi-hasil-mutasi-radiasi
- Hadar I. 2008. Memerangi Kelaparan. www.Kompas.com. Opini. Sabtu, 21 Juni 2008.
- <http://www.dikti.go.id/id/2012/09/05/ipb-luncurkan-5-varietas-padi-unggul>.
- Husodo S Y. 2002, Membangun Kemandirian di Bidang Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. *Makalah Rapimnas Kadin Indonesia, 27-28 Februari, Jakarta*.
- Irawan. 2005. Analisis Ketersediaan Beras Nasional: Suatu Kajian Simulasi Pendekatan Sistem Dinamis. *Prosiding Multifungsi Pertanian 2005*.
- Nasution M 2008. Tinggalkan Beras, Beralihlah ke Tepung Lokal. www.Kompas.com. Opini. Sabtu 23 Februari 2008.
- Triyanto J. 2006. Analisis Produksi Padi di Jawa Tengah. [Tesis] Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [UU] Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan.